

Hubungan antara Politik dan Penyiaran Televisi

Ahmad Sampurna Rambe¹, Melja Ramadan²,
Muhammad Daffa Raihan³, Alika Faza Qhintara Manurung⁴, Tadzkiya Aulia⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: ahmadsampurnauinsu@gmail.com¹, melja1811@gmail.com²,
mdaffaraihan04@gmail.com³, alikafaza6@gmail.com⁴, tadzkiya9@gmail.com⁵

Corresponding Author: Ahmad Sampurna Rambe

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara politik dan penyiaran televisi di Indonesia, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan pers. Televisi, sebagai media utama dalam menyampaikan informasi politik, sering kali terpengaruh oleh kepentingan politik pemilik media, yang memengaruhi objektivitas pemberitaan. Melalui analisis kualitatif terhadap program-program televisi yang menampilkan konten politik, penelitian ini menemukan adanya dominasi pemberitaan dari partai atau tokoh politik tertentu, serta distorsi informasi yang menciptakan ketidakseimbangan dalam penyajian berita. Afiliasi politik pemilik media berperan besar dalam mengarahkan kebijakan editorial, yang mengurangi independensi redaksi dan kualitas kebebasan pers. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi media masyarakat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap media penyiaran untuk menjaga integritas jurnalisme dan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Independensi Media, Literasi Media, Penyiaran Televisi, Politik.

Abstract

This study examines the relationship between politics and television broadcasting in Indonesia, and its impact on the quality of democracy and press freedom. Television, as the main medium for conveying political information, is often influenced by the political interests of media owners, which affects the objectivity of reporting. Through a qualitative analysis of television programs that feature political content, this study found that there was a dominance of news from certain political parties or figures, as well as distortion of information that created an imbalance in news presentation. The political affiliation of media owners plays a major role in directing editorial policies, which reduces editorial independence and the quality of press freedom. This study suggests the need to improve public media literacy and stricter supervision of broadcast media to maintain the integrity of journalism and democracy in Indonesia.

Keywords: Democracy, Media Independence, Media Literacy, Television Broadcasting, Politics.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi, khususnya media penyiaran televisi, telah membawa pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik masyarakat. Televisi tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memainkan peran penting sebagai media informasi dan pendidikan publik. Dalam konteks politik, televisi memiliki posisi strategis sebagai medium penyampaian pesan-pesan politik dari elite kepada masyarakat luas. Melalui program-program berita, talk show politik, debat calon pemimpin, hingga iklan kampanye, televisi membentuk opini publik, membangun citra tokoh politik, dan bahkan mempengaruhi keputusan pemilih dalam proses demokrasi. Dengan kata lain, relasi antara politik dan penyiaran televisi

bersifat timbal balik dan kompleks, di mana keduanya saling memanfaatkan untuk mencapai tujuan masing-masing (Darmawan, 2020).

Televisi sebagai bagian dari industri massa sering kali berada dalam pusaran kepentingan politik. Di satu sisi, media televisi membutuhkan akses terhadap sumber-sumber berita politik, termasuk informasi dari partai politik, pejabat negara, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Di sisi lain, aktor-aktor politik membutuhkan televisi sebagai alat untuk memperluas jangkauan komunikasi politik mereka. Ketergantungan ini menciptakan dinamika yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas media. Bahkan, dalam banyak kasus, media televisi menjadi alat propaganda politik yang secara sadar atau tidak memihak kepada kekuatan politik tertentu. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai netralitas media, etika jurnalistik, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi di suatu negara (Muhammad, 2017).

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara politik dan penyiaran televisi menjadi semakin menarik untuk dikaji, terutama sejak era reformasi yang membuka keran kebebasan pers dan lahirnya berbagai stasiun televisi swasta (Hasan, 2021). Perubahan regulasi dan liberalisasi media memberikan ruang bagi kepemilikan media oleh aktor-aktor politik atau pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik tertentu. Kondisi ini melahirkan sebuah lanskap media yang tidak lagi semata-mata didorong oleh kepentingan publik, melainkan juga oleh agenda-agenda politik dan ekonomi pemilik modal. Akibatnya, konten siaran televisi sering kali tidak mencerminkan keberagaman suara dan kepentingan masyarakat secara adil, melainkan cenderung mengedepankan narasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara politik dan penyiaran televisi menjadi sangat relevan dan penting, tidak hanya untuk memahami dinamika komunikasi politik di era modern, tetapi juga untuk menilai sejauh mana peran media dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui jurnal ini, penulis akan mengeksplorasi bagaimana politik mempengaruhi isi siaran televisi, bagaimana televisi memengaruhi persepsi politik masyarakat, serta bagaimana kedua elemen ini membentuk hubungan yang saling mempengaruhi dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini (Rina, 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai hubungan antara dunia politik dan penyiaran televisi di Indonesia. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya bagaimana kepentingan politik memengaruhi isi, arah, dan kebijakan siaran televisi (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini berfokus pada realitas sosial-politik yang tercermin dalam program-program televisi, baik dalam pemberitaan, *talk show* politik, maupun kampanye politik yang disiarkan selama masa pemilu atau pada momen-momen krusial dalam kehidupan politik nasional. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan langkah-langkah mulai dari reduksi data, penyajian data,

hingga penarikan kesimpulan. Peneliti mengelompokkan informasi berdasarkan tema dan pola tertentu yang muncul dari data, seperti keberpihakan media, *framing* pemberitaan, serta keterkaitan antara kepemilikan media dan afiliasi politik. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh berasal dari berbagai sudut pandang dan tidak bias terhadap satu perspektif saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis isi terhadap sejumlah program televisi nasional yang menyajikan konten politik, ditemukan adanya pola sistematis keterkaitan antara kepentingan politik dan arah penyiaran televisi. Program-program berita politik, seperti *talk show*, *headline news*, laporan khusus, hingga debat kandidat, memperlihatkan indikasi kuat akan adanya afiliasi politik yang mendasari pemilihan narasumber, sudut pandang pemberitaan, serta intensitas eksposur terhadap figur-firug politik tertentu. Salah satu temuan paling menonjol adalah dominasi pemberitaan oleh satu atau dua partai besar menjelang masa kampanye pemilu, di mana tokoh-tokohnya ditampilkan secara berulang dengan narasi yang membangun citra positif, tanpa disertai porsi pemberitaan yang setara terhadap tokoh atau partai lain. Kecenderungan ini memperlihatkan adanya distorsi dalam prinsip keberimbangan informasi, yang seharusnya menjadi dasar etika jurnalistik dalam media massa, khususnya televisi.

Lebih lanjut, hasil observasi mendalam menunjukkan bahwa arah kebijakan redaksional dalam banyak stasiun televisi swasta ternyata sangat dipengaruhi oleh siapa pemilik media tersebut. Beberapa media televisi diketahui dimiliki oleh individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam dunia politik, baik sebagai politisi aktif, calon legislatif, atau pemegang kepentingan strategis dalam partai politik. Kepemilikan ini membawa konsekuensi terhadap konten siaran yang dihasilkan.

Misalnya, dalam pemberitaan seputar kebijakan pemerintah, televisi-television tertentu lebih sering menampilkan sisi positif dari kebijakan yang digagas oleh afiliasi politik pemilik media, dan sangat jarang memberikan ruang pada pihak-pihak yang kritis terhadap kebijakan tersebut. Begitu pula dalam peliputan konflik politik, televisi kerap mengambil posisi tertentu yang sejalan dengan kepentingan politik pemilik modal, dan tidak jarang mengabaikan asas objektivitas demi menjaga citra atau kekuasaan pihak yang berkepentingan.

Dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa jurnalis aktif, redaktur senior, dan akademisi komunikasi, terungkap bahwa tekanan politik terhadap ruang redaksi menjadi fenomena yang kian umum. Tekanan ini bisa berbentuk arahan langsung dari pemilik media, intervensi terhadap penyuntingan berita, hingga pembatasan terhadap isu-isu sensitif yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu yang memiliki keterkaitan dengan manajemen media. Para narasumber juga mengemukakan bahwa dalam situasi tertentu, kebebasan wartawan untuk meliput secara independen dibatasi demi menjaga hubungan politik yang telah terjalin dengan aktor tertentu. Hal ini tidak hanya berdampak pada kualitas pemberitaan, tetapi juga pada moral dan profesionalisme para pekerja media itu sendiri.

Di sisi lain, dari sisi audiens, khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah dan masyarakat pedesaan yang mengandalkan televisi sebagai satu-satunya sumber informasi, masih menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap isi siaran televisi. Minimnya akses terhadap media alternatif seperti portal berita online atau media sosial membuat televisi tetap menjadi saluran utama pembentukan opini publik. Ini menjadi sangat krusial, karena jika televisi yang mereka akses secara rutin menyajikan informasi yang bias secara politik, maka persepsi publik pun akan terbentuk dalam satu arah tanpa ada peluang besar untuk melakukan verifikasi atau pembanding informasi. Hal ini membuktikan bahwa pengaruh televisi tidak hanya terjadi di ruang redaksi atau elite politik, tetapi juga meresap hingga ke ruang-ruang sosial tempat masyarakat membentuk pendapat politiknya sehari-hari.

Selain itu, ditemukan pula bahwa masyarakat tidak selalu menyadari adanya afiliasi politik di balik siaran televisi yang mereka konsumsi. Sebagian besar pemirsa menerima informasi sebagaimana adanya, tanpa mempertanyakan motif atau tujuan di balik pemberitaan tersebut. Ini memperlihatkan bahwa literasi media masyarakat masih cukup rendah, khususnya dalam membaca framing berita dan mengenali kepentingan yang tersembunyi dalam narasi media. Padahal, dalam era demokrasi yang sehat, masyarakat seharusnya memiliki daya kritis yang cukup untuk membedakan mana informasi yang obyektif dan mana yang merupakan bagian dari strategi komunikasi politik.

Pembahasan

Dominasi Kepentingan Politik dalam Konten Siaran

Dalam era modern ini, televisi masih menjadi media utama dalam menyampaikan informasi politik kepada masyarakat luas, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di balik fungsinya sebagai penyampai informasi, televisi juga sering kali menjadi medium yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Fenomena ini tampak jelas dalam penyajian konten politik di berbagai program siaran, seperti berita utama, talk show, dan debat publik yang disiarkan secara nasional. Pemilihan isu, durasi tayangan, hingga framing narasi cenderung tidak netral, melainkan dipengaruhi oleh afiliasi atau preferensi politik dari pemilik atau pengelola media. Keberpihakan ini tidak selalu disampaikan secara eksplisit, tetapi bisa dikenali dari bagaimana narasi dibangun untuk menguntungkan pihak tertentu atau mendiskreditkan pihak lain (Bambang, 2021).

Kecenderungan ini semakin menonjol ketika memasuki masa kampanye pemilu. Dalam beberapa studi dan observasi, ditemukan bahwa stasiun televisi tertentu memberikan liputan yang sangat besar terhadap kegiatan kampanye atau pernyataan politik dari satu tokoh atau partai, sementara kompetitornya hanya memperoleh sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Strategi ini dilakukan secara halus namun konsisten, misalnya dengan menampilkan tokoh tersebut dalam momen-momen positif, seperti memberikan bantuan sosial, menghadiri acara keagamaan, atau berbicara dengan nada optimis dan solutif terkait isu nasional. Sebaliknya, lawan politiknya sering kali ditampilkan dalam konteks masalah, konflik, atau kritik terhadap pemerintah. Ketimpangan representasi ini pada akhirnya membentuk

persepsi publik yang cenderung tidak seimbang dan dipengaruhi secara tidak sadar oleh narasi televisi (Agus, 2020).

Selain isi konten, dominasi kepentingan politik juga terlihat dalam pemilihan narasumber atau tokoh yang diundang untuk berbicara di hadapan publik. Dalam berbagai talk show politik, narasumber yang dihadirkan sering kali berasal dari pihak-pihak yang selaras dengan pandangan media tersebut atau pemiliknya. Akibatnya, diskusi yang terjadi cenderung satu arah dan minim kritik. Hal ini menciptakan ilusi debat publik yang seolah-olah demokratis, padahal sebenarnya telah dikonstruksi untuk memperkuat posisi politik tertentu. Dampaknya, publik tidak mendapat informasi yang utuh dan beragam, melainkan hanya potongan-potongan narasi yang telah difilter sesuai dengan agenda editorial media.

Lebih jauh lagi, dominasi kepentingan politik dalam televisi juga mencerminkan pergeseran peran media sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) menjadi mitra kekuasaan. Fungsi kontrol terhadap penguasa menjadi lemah ketika media justru terlibat dalam proses pencitraan politik, baik terhadap tokoh eksekutif maupun legislatif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat membahayakan sistem demokrasi, karena publik kehilangan akses terhadap informasi yang kritis dan objektif. Ketika televisi tidak lagi mewakili suara masyarakat, tetapi menjadi corong elite politik, maka ruang publik yang seharusnya terbuka dan plural berubah menjadi ruang yang dikendalikan dan penuh kepentingan sepihak.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, terutama kalangan akademisi dan pemerhati media, untuk terus mengkritisi dominasi kepentingan politik dalam penyiaran televisi. Upaya peningkatan literasi media perlu terus digalakkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak netral. Selain itu, peran lembaga pengawas penyiaran seperti KPI juga perlu diperkuat agar dapat menjalankan fungsi kontrol yang independen terhadap konten siaran yang berpotensi menyesatkan publik dan merusak tatanan demokrasi.

Afiliasi Pemilik Media dan Pengaruhnya terhadap Independensi Redaksi

Di negara ini, banyak televisi swasta yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang memiliki ikatan erat dengan dunia politik, baik melalui jabatan politik, keterlibatan dalam partai, atau hubungan bisnis dengan tokoh-tokoh politik. Kondisi ini menciptakan ketergantungan yang mendalam antara media dengan kekuatan politik, yang memengaruhi kebijakan editorial dalam produksi berita. Media, yang seharusnya menjadi ruang yang bebas dari campur tangan politik, sering kali terjebak dalam dilema etis ketika berusaha mempertahankan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan tuntutan politik. Afiliasi ini memperburuk kemungkinan objektivitas pemberitaan, karena kepentingan politik pemilik media sering kali ikut menentukan arah berita yang akan dipublikasikan atau disiarkan.

Dalam praktiknya, pengaruh afiliasi politik pemilik media sering kali menyebabkan redaksi menghadapi tekanan untuk mengubah atau menghindari pemberitaan yang dianggap merugikan pihak tertentu. Tekanan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari instruksi langsung dari atasan di perusahaan media hingga ketakutan tidak mendukung agenda politik pemilik yang dapat berdampak pada keberlanjutan bisnis media tersebut. Di masa pemilu, misalnya, stasiun televisi

yang dimiliki oleh politisi tertentu cenderung memberikan lebih banyak ruang bagi aktivitas politik tokoh yang mendukung pemilik media tersebut, sementara pemberitaan mengenai pihak lawan lebih banyak diabaikan atau dibatasi. Framing pemberitaan sering kali dibuat untuk menguntungkan pihak yang memiliki afiliasi dengan media, yang akhirnya membuat berita yang disajikan kepada publik tidak sepenuhnya mencerminkan kebenaran atau keberagaman pandangan (Hidaya, 2021).

Lebih jauh lagi, pengaruh afiliasi politik ini juga menurunkan kualitas kebebasan pers di Indonesia. Media yang seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan, justru menjadi alat untuk memperkuat posisi politik pemiliknya. Ketika media disusupi oleh kepentingan politik, objektivitas yang seharusnya menjadi prinsip dasar jurnalistik menjadi kabur. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kredibilitas media dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang mereka terima.

Masyarakat yang bergantung pada televisi sebagai sumber utama informasi menjadi semakin sulit untuk membedakan antara fakta dan opini yang disamarkan dalam berita. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak termasuk regulator seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memastikan bahwa media tetap menjalankan fungsinya secara independen dan bertanggung jawab, tanpa dipengaruhi oleh afiliasi politik yang mengancam integritas jurnalisme itu sendiri (Sutrisno, 2019).

Televisi sebagai Alat Propaganda Politik Modern

Televisi telah terbukti menjadi salah satu alat propaganda politik yang sangat efektif di era modern, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Penyampaian informasi melalui gambar bergerak, suara, dan narasi yang mengalir dengan ritme yang teratur menciptakan dampak psikologis yang mendalam bagi audiens. Audiens televisi, yang biasanya menerima informasi secara pasif, sangat rentan terhadap pengaruh visual dan emosional yang disampaikan oleh media ini. Dalam konteks politik, televisi tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan fakta, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk opini dan persepsi publik (Aisyah, 2019).

Melalui framing yang terencana dan penyusunan narasi yang terstruktur, televisi dapat memanipulasi pemahaman audiens terhadap suatu peristiwa atau tokoh politik. Dengan penggunaan gambar yang kuat, musik latar yang mendalam, serta kata-kata yang penuh makna, televisi membentuk cara masyarakat melihat isu-isu politik, sering kali tanpa mereka sadari.

Lebih dari sekadar iklan kampanye atau debat politik, televisi juga mengemas propaganda politik dalam bentuk yang lebih halus melalui program-program hiburan, talk show, dan dokumenter. Sebagai contoh, beberapa program hiburan atau drama yang disiarkan menjadikan tokoh politik atau partai tertentu sebagai simbol pahlawan atau pembawa perubahan, membentuk citra positif tanpa harus langsung mempromosikan mereka dalam konteks politik. Program talk show dan debat politik juga sering kali diatur untuk memberi ruang lebih banyak pada tokoh-tokoh yang dekat dengan penguasa atau pemilik media, yang dengan cara ini memperkuat narasi yang mendukung pihak tertentu.

Persepsi Publik dan Literasi Media dalam Konsumsi Siaran Politik

Hubungan yang semakin erat antara politik dan penyiaran televisi di Indonesia membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan demokrasi dan kebebasan pers di negara ini. Media penyiaran, yang seharusnya menjadi ruang bagi publik untuk mendapatkan informasi yang beragam dan mencerminkan kepentingan semua golongan, kini sering kali digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan agenda kelompok elite tertentu. Ketika televisi berpihak kepada satu kekuatan politik atau pihak penguasa, maka keberagaman informasi yang seharusnya ada dalam ruang publik menjadi tereduksi (Adi, 2018; Alfiansyah, *et.al.*, 2020).

Hal ini mempersulit masyarakat untuk memperoleh informasi yang objektif, lengkap, dan tidak terdistorsi, yang pada gilirannya memperlemah kualitas demokrasi. Dalam kondisi ini, suara-suara kritis yang berfungsi sebagai pengawas jalannya pemerintahan atau sebagai alternatif terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil, sering kali tertutup atau dibungkam. Akibatnya, masyarakat semakin terisolasi dari pandangan yang berbeda dan tidak mendapat gambaran yang utuh tentang situasi politik yang sesungguhnya.

Selain itu, tekanan terhadap jurnalis dan redaksi juga menjadi ancaman nyata bagi kebebasan pers di Indonesia. Jurnalis yang bekerja di media yang terafiliasi dengan kepentingan politik tertentu sering kali menghadapi dilema dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Beberapa di antaranya bahkan mungkin terpaksa mengubah atau menghilangkan laporan yang bisa dianggap merugikan pihak yang memiliki kekuasaan politik atau pengaruh media. Dalam situasi semacam ini, kebebasan pers yang seharusnya menjadi salah satu pilar penting demokrasi malah terancam (Rahmawati, 2021).

Demokrasi yang sehat hanya dapat tercipta jika media berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan, bukan justru menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, pengawasan terhadap relasi antara politik dan penyiaran televisi sangat penting agar ekosistem demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah pasca reformasi tetap terjaga. Jika tidak, maka media penyiaran bisa menjadi instrumen yang merusak prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, keberagaman, dan transparansi.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara politik dan penyiaran televisi di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan pers. Televisi, yang seharusnya berfungsi sebagai ruang publik yang independen, justru sering kali menjadi alat untuk memperjuangkan agenda politik kelompok elite, baik itu melalui pemberitaan yang bias, pemilihan narasumber yang terbatas, atau framing yang mendukung kepentingan politik tertentu. Dominasi kepentingan politik dalam media televisi memperburuk objektivitas pemberitaan, yang mengarah pada distorsi informasi yang diterima oleh publik.

Selain itu, ketergantungan media pada pemilik yang memiliki afiliasi politik semakin memperburuk independensi redaksi, menciptakan tekanan terhadap jurnalis dan mengurangi kualitas kebebasan pers. Fenomena ini menurunkan kemampuan media untuk berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, yang pada gilirannya

mengancam demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi dan mengkritisi hubungan antara politik dan penyiaran televisi, serta meningkatkan literasi media di masyarakat agar dapat mengidentifikasi dan menghindari informasi yang dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, H. (2018). *Politik dan Media Massa: Pengaruh Penyiaran Televisi terhadap Persepsi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Agus, W. (2020). "Pengaruh Politik terhadap Program Siaran Televisi: Analisis pada TVRI dan Metro TV". *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15 No. 1.
- Aisyah, M. (2019). *Televisi dan Dinamika Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Alfiansyah, M., Assingkily, M. S., & Prastowo, A. (2020). Kebijakan Internal Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, 11(1), 52-67. <https://www.academia.edu/download/105809027/3192.pdf>.
- Bambang, P. (2021). "Kebijakan Penyiaran dan Implikasinya terhadap Politik Media di Indonesia". *Jurnal Studi Media*, Vol. 14 No. 4.
- Darmawan, P. (2020). *Politik Televisi: Analisis Keterkaitan Media Penyiaran dengan Kepentingan Politik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hasan, A. (2021). "Kepemimpinan Transformasional dalam Komunikasi Politik." *Jurnal Kepemimpinan Politik*. Vol. 4 No. 3.
- Hidayat, S. (2021). *Televisi dan Politik: Peran Media dalam Proses Demokratisasi*. Malang: UMM Press.
- Muhammad, H. (2017). *Peran Media dalam Kampanye Politik di Indonesia*. Penerbit Universitas Negeri Jakarta.
- Rahmawati, S. (2021). *Media Penyiaran Televisi dan Implikasinya dalam Politik Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Rina, S. (2017). "Politik Media: Analisis Terhadap Program Siaran Televisi dan Dampaknya pada Opini Publik". *Jurnal Komunikasi dan Politik*. Vol. 9 No. 2.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, R. (2019). *Politik, Media, dan Sosial: Hubungan Televisi dan Kepentingan Politik*. Bandung: Refika Aditama.